



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Telp/Fax. 5264518
Telp. 5264517 ex.209/Fax. 5264518

Jakarta, 27 Desember 2022

Nomor : PPE.1.PP.01.05-2317
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Yth.
Bapak/Ibu/Saudara
di Tempat

Berdasarkan surat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor B-2201/Setmen.Birohh/HK.02.01/12/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal permohonan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri PPPA, dengan hormat bersama ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri PPPA yang diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : **Kamis, 29 Desember 2022**
Waktu : **Pukul 09.00 s.d selesai**
Tempat : **Video Conference Zoom**
Meeting ID : 821 7938 1571
Passcode : DAK2023

<https://us06web.zoom.us/j/82179381571?pwd=YWI4WU5FQjJlOVFaajRmNGFwSEYrUT09>

Acara : **Rapat Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri PPPA tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023**

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 Desember 2022,

a.n Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan,
Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang undangan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ceno Hersusetiokartiko, Bc.I.P., S.H., M.H.
NIP. 19690706 1992031001

Tembusan Yth:
Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Lampiran Surat

Nomor : PPE.1.PP.01.05-2317

Tanggal : 27 Desember 2022

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Sekretaris Kementerian
2. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
3. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
4. Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan
5. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga
6. Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Keluarga
7. Staf Khusus Menteri Bidang Perempuan
8. Staf Khusus Menteri Bidang Anak
9. Inspektur
10. Kepala Biro Data dan Informasi
11. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
12. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
13. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
14. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan
15. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
16. Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan
17. Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan
18. Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
19. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
20. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus
21. Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
22. Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
23. Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak
24. Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender
25. Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
26. Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat
27. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
28. Analis Hukum pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
29. Perencana pada Biro Perencanaan dan Keuangan
30. Analis Anggaran pada Biro Perencanaan dan Keuangan
31. Staf Pelaksana pada Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

32. Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
33. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
34. Direktur Harmonisasi I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
35. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
36. Tim 13 Kelompok Kerja/Perancang Peraturan Perundang-undangan Harmonisasi Peraturan Menteri dan Peraturan Badan/Lembaga

Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

37. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga
38. Direktur Pembangunan Daerah

Kementerian Dalam Negeri

39. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah

40. Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

Kementerian Keuangan

41. Direktur Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
42. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Anggaran

Sekretariat Kabinet

43. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak